

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT  
NOMOR  
TANGGAL**

**CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PADA PASAL 154 AYAT (1) HURUF h BAHWA DPRD KABUPATEN/KOTA MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG: MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI / WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. DAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PADA PASAL 19 AYAT 1 BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

ATAS DASAR TERSEBUT MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN BAGI KAMI DPRD KABUPATEN GARUT UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENGEVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN 2019, YANG NOTA PENGANTARNYA TELAH DISAMPAIKAN DIHADAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA TANGGAL 15 APRIL 2020 YANG LALU.

ADAPUN MAKSUD DAN TUJUAN DARI PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. LKPJ DALAM PP 13 TAHUN 2019 BAHWA PEMBAHASAN LKPJ AKAN MENGHASILKAN SEBUAH KEPUTUSAN DPRD YANG BERISI REKOMENDASI KEPADA KEPALA DAERAH SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA, SERTA PENYUSUNAN

PERATURAN DAERAH , PERATURAN KEPALA DAERAH , DAN ATAU KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH.

2. LKPJ DIMAKSUDKAN SEBAGAI MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD YANG MENGINFORMASIKAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REALISASI KEUANGAN DAERAH SELAMA SATU TAHUN;
3. TUJUAN LKPJ ADALAH MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH YANG MEMUAT PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, HASIL YANG DICAPAI SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA;
4. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA BUPATI DALAM BENTUK CATATAN STRATEGIS, BAIK YANG MENYANGKUT CAPAIAN-CAPAIAN KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN DARI SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAIMANA PENJABARAN DARI STRATEGI YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK PERBAIKAN PEMERINTAHAN PERIODE BERIKUTNYA.

SEBAGAIMANA DIMAKLUMI BERSAMA, BAHWA TAHUN ANGGARAN 2019 MERUPAKAN IMPLEMENTASI TAHUN KELIMA DARI PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019, SEKALIGUS SEBAGAI AKHIR TAHUN DARI MASA KEPEMIMPINAN SAUDARA RUDY GUNAWAN DAN HELMI BUDIMAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT UNTUK PERIODE 2014-2019. UNTUK ITU KAMI SANGAT BERHARAP CATATAN STRATEGIS INI, DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI GAMBARAN EVALUASI DAN REFERENSI BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERIODE BERIKUTNYA, SEBAGAI TUGAS UTAMA DARI PEMERINTAH DAERAH, SERTA KAMI JUGA SANGAT BERHARAP AGAR SAUDARA **BUPATI DAN WAKIL BUPATI** DAPAT SENANTIASA MEMPERHATIKAN SELURUH CATATAN-CATATAN STRATEGIS YANG TELAH DISAMPAIKAN TERHADAP LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

ADAPUN TERKAIT DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 MAKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:

**A. MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS, TERJANGKAU, PRIMA UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYAKARAT BERMARTABAT DAN AGAMIS.**

1. PADA SEKTOR PENDIDIKAN, TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PERLU MEMDAPATKAN PERHATIAN BAGI PEMERINTAH DAERAH SAAT INI, YAITU ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

- a) DALAM CAPAIAN REALISASI PENINGKATAN INDEK PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 MENCAPAI 57,87 POIN DAPAT MELAMPAUI CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD SEBESAR 56,80 POIN ATAU CAPAIAN 101,87% NAMUN KALAU DILIHAT DARI PROSENTASE PERTUMBUHANNYA MASIH CUKUP JAUH DI BANDING PROSENTASE PERTUMBUHAN INDEK PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT SEBESAR 5,58% DAN PERTUMBUHAN INDEK PENDIDIKAN NASIONAL SEBESAR 5,96% DIMANA KABUPATEN GARUT HANYA MENCAPAI 5,11% SAJA ATAU PERINGKAT KE 14 DARI 27 KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT, PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PENDIDIKAN HARUS SEGERA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG JELAS DAN TERUKUR SEHINGGA KEDEPANNYA DAPAT MENINGKATKAN INDEKS PENDIDIKAN SECARA SIGNIFIKAN. SALAH SATU LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL ADALAH DENGAN MENDUKUNG KEBIJAKAN PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KECAMATAN YANG MEMILIKI ANGKA PUTUS SEKOLAH TERENDAH DAN TERTINGGI, DISAMPING ITU HARUS ADA KEBIJAKAN INTERVENSI DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DENGAN CARA MENGINTENSIFKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR YANG LEBIH DEKAT KE MASYARAKAT DENGAN KETENTUAN LEMBAGA TERSEBUT MEMILIKI DATA YANG BY NAME BY ADRESS MELIPUTI DATA PENDUDUK PUTUS SEKOLAH ATAU TIDAK TAMAT SEKOLAH ATAU TIDAK PERNAH SEKOLAH.

- b) PENEMPATAN GURU PNS DI TIAP SEKOLAH TERUTAMA DI DAERAH PELOSOK MASIH TIDAK MERATA. BANGUNAN KELAS BANYAK YANG TERINDIKASI RUSAK BERAT BAIK SD MAUPUN SMP APALAGI YANG MENYANGKUT ADANYA SEKOLAH YANG ROBOH, ITU BUKTI KEGAGALAN, DISAMPING ITU PEMECAHAN PERMASALAHAN TENTANG GURU HONORER MASIH SIMPANG SIUR DAN KETIDAKJELASAN STATUS PENGANGKATAN HONORER MENJADI PNS ATAUPUN P3K MENJADI POLEMIC PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DAERAH AGAR LEBIH MEMPERHATIKAN POIN - POIN DIATAS DENGAN USAHA YANG MAKSIMAL DAN TERARAH, DISAMPING ITU DALAM HAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN HENDAKNYA JANGAN MELUPAKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK HAL INI SESUAI AMANAT PERPRES 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG HARUS DI IMPLEMENTASIKAN DENGAN MEMBUAT SEBUAH KURIKULUM YANG TERINTEGRASI.
- c) TERKAIT DENGAN KUALITAS BANGUNAN SEKOLAH DIMANA SEKOLAH DASAR (SD) DARI JUMLAH 9.524 RUANG KELAS DI TAHUN 2018 TERDAPAT RUSAK SEDANG 1.210 RUANG KELAS DAN KONDISI RUSAK BERAT SEBANYAK 1029 RUANG KELAS, SEDANGKAN DI TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH 9.649 RUANG KELAS TERDAPAT 1.232 RUSAK BERAT DAN 1.297 RUSAK SEDANG ADAPUN UNTUK RUANG KELAS SMP DARI JUMLAH 3.365 RUANG KELAS TAHUN 2018 TERDAPAT RUSAK BERATNYA 245 RUANG KELAS DAN 334 RUSAK SEDANG, SEDANGKAN DI TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH 3.441 RUANG KELAS TERDAPAT 240 RUSAK BERAT DAN 348 RUSAK SEDANG KALAU MELIHAT DATA DI ATAS HAMPIR TIDAK ADA PERUBAHAN JUMLAH RUANG KELAS YANG DIPERBAIKI SECARA SIGNIFIKAN, NAMUN DEMIKIAN KARENA URUSAN PENDIDIKAN MERUPAKAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH MAKA KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR BUPATI GARUT MENGANGGARKAN SECARA KHUSUS DARI APBD UNTUK PERBAIKAN SARANA PRASARANA SEKOLAH SD DAN SMP KHUSUSNYA KETERSEDIAAN RKB SEHINGGA TIDAK HANYA MENGANDALKAN DANA DAK PEMERINTAH PUSAT SAJA.

TIDAK ADA MOTIVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN FASILITAS RUANG KELAS SEHINGGA SAMPAI SAAT INI MASIH BANYAK RUANG KELAS YANG RUSAK BERAT DAN SEDANG. BEGITU JUGA FASILITAS MCK DI TIAP SEKOLAH YANG TIDAK BERBANDING LURUS DENGAN JUMLAH MURID SEHINGGA SULIT UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT.

- d) ANGKA LAMA SEKOLAH UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN BELUM TERCAPI HAL INI DISEBABKAN KURANGNYA JUMLAH SEKOLAH LANJUTANNYA. ADAPUN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MASIH BERBIAYA MAHAL.
  - e) PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMBERIKAN INSENTIF YANG SEPADAN DAN MANUSIAWI UNTUK GURU HONORER BAIK ITU DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA.
  - f) PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA DINAS PENDIDIKAN HARUS MENGINVENTARISIR ASET SEKOLAH YANG TERGUSUR AKIBAT PROJEK REAKTIVASI KERETA API SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR.
  - g) DENGAN ADANYA PENYALAHGUNAAN TABUNGAN SISWA DI SEKOLAH OLEH OKNUM GURU MAKA KEDEPANYA BUPATI GARUT MELALUI DINAS PENDIDIKAN MEMBUAT SURAT EDARAN TERKAIT TABUNGAN SISWA UNTUK BEKERJASAMA DENGAN BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH.
2. BERKAITAN DENGAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU DR. SLAMET GARUT, MAKA ADA BEBERAPA CATATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN YAITU SEBAGAI BERIKUT:
- a) TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN ADALAH TEMPAT VITAL DALAM PENANGANAN UPAYA-UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TETAPI SEJAUH INI DILIHAT DARI KUANTITASNYA TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERBENTUK RUMAH SAKIT MASIH SANGAT KURANG, SEJAUH INI ADA PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI WILAYAH GARUT UTARA YAITU RS MALANGBONG DAN LIMBANGAN, TETAPI SAMPAI SAAT INI BELUM BISA DI

REALISASIKAN HAL INI SEBAGAI BENTUK BURUKNYA PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH

DAPAT DILIHAT SEBAGAI BENTUK KETIDAKSERIUSAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KESEHATAN. SELAIN ITU PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT DASAR YAITU PUSKESMAS MASIH PERLU DITINGKATKAN, SALAH SATUNYA ADALAH PENATAAN ADMINISTRASI BIROKRASI YANG CEPAT DAN TEPAT SEHINGGA MASYARAKAT BISA SEGERA MENDAPATKAN TINDAKAN KESEHATAN TANPA HARUS LAMA MENUNGGU. JUMLAH DOKTER DI TINGKAT PUSKESMAS HARUS TERUS DI TAMBAH, AGAR PASIEN BISA DILAYANI SAMPAI TUNTAS DI TINGKAT PELAYANAN DASAR, KEMUDIAN MASIH BANYAK FASILITAS PUSTU YANG TIDAK REPRESENTATIF SEHINGGA BELUM BISA DI AKTIFKAN SECARA MAKSIMAL, KEBERADAAN PUSTU DIRASA MUBADZIR, BEGITU JUGA DENGAN POS YANDU DAN FASILITASNYA HARUS TERUS DI TINGKATKAN DAN DIBUATKAN INOVASI SERTA AGENDA YANG JELAS AGAR KEGIATAN DI POS YANDU EFEKTIF.

AGAR DITINJAU KEMBALI TERKAIT BIAYA OPERASIONAL AMBULANCE YANG SANGAT MEMBERATKAN PASIEN KARENA KETIDAKJELASAN PENGHITUNGAN BEBAN BIAYA OPERASIONAL SEHINGGA SEMUA BIAYA DI BEBANKAN PADA PASIEN.

- b) PASIEN PESERTA BPJS BANYAK YANG DIBEANI UNTUK PEMBELIAN OBAT DENGAN ALASAN OBAT TERSEBUT DILUAR TANGGUNGAN BPJS ATAU TIDAK TERSEDIA DI RUMAH SAKIT.
- c) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SEBAIKNYA DILAKSANAKAN SECARA TUNTAS DAN TERINTEGRASI DENGAN SELURUH DINAS INTANSI YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN KESEHATAN, BUKAN SAJA TUGAS DINAS KESEHATAN, RSUD DAN PUSKESMAS, AKAN TETAPI ADA DINAS INTANSI YANG JUGA MENJADI KUNCI SETRATEGIS TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN, SEPERTI KEBERADAAN BPJS YANG MENGATUR TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DALAM SYSTEM RUJUKAN BERJENJANG. DAN HAL INI SANGAT BERPENGARUH TERHADAP LAYANAN KHUSUSNYA DI RSUD DR SLAMET. HAL INI DAPAT KAMI GAMBARKAN BAHWA PEMEGANG PROGRAM KESEHATAN TENTUNYA ADA DI DINAS KESEHATAN SAMPAI TINGKAT

PELAYANAN DASAR YANG DILAKUKAN PUSKESMAS, RSU BERPERAN MELAKUKAN FUNGSI REHABILITATIVE, SEMENTARA BERJALANNYA PELAYANAN RSU YANG BAIK DITENTUKAN SEJAUH MANA LANCAR TIDAKNYA KLAIM YANG DIBAYARKAN BPJS, APALAGI TERKAIT PENYELENGARAAN PROGRAM JKN-KIS BAIK YANG MANDIRI ATAU PBI TENTU JUGA DINAS SOSIAL HARUS MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI PEMEGANG DATA KAITAN DENGAN PESERTA BPJS KIS TERUTAMA YANG TERCANTUM DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) SECARA KEDINASAN.

- d) REALISASI PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA PADA DINAS KESEHATAN, SEPERTI PEMBANGUNAN 3 RUMAH SAKIT DI GARUT UTARA DAN SELATAN YANG BELUM BISA DIREALISASIKAN DENGAN ALASAN BELUM ADANYA PENGADAAN LAHAN KEMUDIAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BERMASALAH DAN ATAU TIDAK SESUAI HARAPAN MASYARAKAT SEHINGGA HAL INI DIKHAWATIR PULA DAPAT MENGGANGGU PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT. DIMANA BERDASARKAN DATA YANG ADA SAAT INI KABUPATEN GARUT PADA AKHIR TAHUN 2019 MASIH SAJA PENYUMBANG ANGKA KASUS KEMATIAN BAYI KETIGA TERBESAR DARI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT, SEBAGAI CATATAN AGAR BUPATI SEGERA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA DINAS KESEHATAN, TERUTAMA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP MANAJEMEN DAN KEMAMPUAN MANAJERIAL SECARA MENYELURUH.
- e) PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PENYEDIAAN TENAGA PROPESIONAL BERKENAAN DENGAN MASIH KURANGYA TENAGA MEDIS MAUPUN NON MEDIS YANG ADA DI PPK BLUD PUSKESMAS-PUSKESMAS YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PELAPORAN ADMINISTRATIF DAN TINDAKAN PELAYANAN PADA PKTP
- f) PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA DINAS KESEHATAN HARUS MELAKUKAN INOVASI BARU DALAM UPAYA PENINGKATAN INDEKS KESEHATAN KHUSUSNYA DALAM MENAIKAN ANGKA HARAPAN HIDUP SERTA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN.

- g) MENDORONG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM UPAYA MEMENUHI JUMLAH DOKTER SPESIALIS, SEHINGGA SELAIN DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN UTAMA PEMERINTAH, JUGA DAPAT MENINGKATKAN GRADE DARI RUMAH SAKIT UMUM dr SLAMET GARUT.
3. PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DAN RESPONSIF DALAM MENGANTISIPASI TIMBULNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN KERAWANAN SOSIAL KARENA, MASIH TINGGINYA ANGKA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KABUPATEN GARUT, SEPERTI MASIH TINGGINYA JUMLAH FAKIR MISKIN, KELUARGA YANG MENEMPATI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KELUARGA RENTAN SOSIAL EKONOMI, STUNTING DAN ANAK TERLANTAR, DALAM BENTUK PROGRAM KERJA NYATA YANG BETUL-BETUL DAPAT MENYENTUH PERMASALAHAN DASAR DARI KEBERADAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ITU SENDIRI. BANTUAN YANG DIBERIKAN SEHARUSNYA BERSIPAT JANGKA PANJANG DIARAHKAN UNTUK MEMBANGUN MENTAL SERTA PERBAIKAN MERUBAH DIRINYA SEHINGGA MENJADI MANDIRI.
  4. PERLU PENANGANAN SECARA INTENSIF BERKAITAN DENGAN ANAK USIA REMAJA YANG RAWAN TERHADAP ANCAMAN MASALAH SOSIAL SEPERTI LGBT, PENYALAHANGUNAAN NARKOBA DAN KETERLIBATAN DENGAN AKSI KEJAHATAN REMAJA YANG MARAK SAAT INI.
  5. DATA TERKAIT DENGAN LGBT DAN KASUS NARKOBA CUKUP TINGGI DAN BELUM ADA PEMUTAKHIRAN DATA YANG AKURAT TERKAIT JUMLAH KEMISKINAN.
- a. MISI II : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL;**
1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEK DAYA BELI KABUPATEN GARUT SEBESAR 63,69 POIN DI TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN PENGELUARAN PER KAPITA Rp 8.099.000 BERHASIL MELAMPAUI TARGET RPJMD SEBESAR Rp 7.623.310, MAKA TELAH MENCAPAI 106,24% TETAPI INI MASIH JAUH DI BAWAH RATA- RATA PENGELUARAN PER KAPITA NASIONAL DAN

PROVINSI TERPAUT Rp 3.053.000. PENGELUARAN PER KAPITA PROVINSI DAN Rp 3.200.000, PENGELUARAN PERKAPITA NASIONAL, DAMPAKNYA SANGAT TERASA PADA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MASIH BERADA DI BAWAH GARIS KEMISKINAN, SEHINGGA HARUS KITA DORONG DENGAN MEMBUKA FASILITAS - FASILITAS PENAMPUNG DAN PENYALUR TENAGA KERJA BAIK ITU TERDIDIK MAUPUN TIDAK TERDIDIK. TIDAK HANYA DENGAN BERDIRINYA PABRIK TAPI BISA KE PERTANIAN DAN PETERNAKAN MODERN, PARIWISATA DAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI LOKAL SEPERTI KOPI GARUT, SENI DOMBA GARUT, JERUK GARUT, BERAS GARUT, DLL. MAKSIMALKAN BANGUNAN GEDUNG PKL 1 DAN 2 , GTC LIMBANGAN, PASAR BUAH WARUNG PETEUUY, GEDUNG PNPM DI KADUNGORA. DAN LAINNYA. BUPATI GARUT HARUS TEGAS DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PASAR DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR YANG BAIK KARENA PASAR MERUPAKAN TEMPAT KEGIATAN JUAL BELI MASYARAKAT KECIL SEHINGGA PASAR TRADISIONAL TIDAK KALAH BERSAING DENGAN MINI MARKET, PENANGANAN PASAR MASIH TIDAK SERAGAM DAN BEDA PERLAKUAN, ADA YANG DI GRATISKAN JONGKO DAN LOS NYA ADA JUGA YANG DIKENAKAN BIAYA CICILAN. UNTUK ITU SEHARUNYA PEMERINTAH DAERAH TIDAK BOLEH MEMBEDAKAN PERLAKUAN KARENA MASYARAKAT MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN SAMA UNTUK MEMPEROLEH PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PERLAKUAN YANG SAMA DARI PEMERINTAH DALAM HAL INI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT, CARIKAN JALAN YANG INOVATIF DALAM PENGELOLAAN PASAR DAN PASAR RAKYAT PUN BISA BAIK DAN BERSIH JIKA DIKELOLA DENGAN KEJUJURAN DAN KAYA INOVASI.

2. BERKENAAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASIS AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, KELAUTAN DAN PARIWISATA, SEBAGAIMANA SASARAN DARI PENCAPAIAN MISI KEDUA RPJMD KABUPATEN GARUT 2014-2019, MAKA ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH DAERAH, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- a) PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS WISATA SERTA MELAKSANAKAN SOSIALISASI KE MASYARAKAT MELALUI GERAKAN MASYARAKAT SADAR WISATA SERTA DENGAN MELIBATKAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG ADA DI DALAMNYA UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MEMBANGUN POTENSI PARIWISATA YANG ADA DI KABUPATEN GARUT AGAR PENGUNJUNG BAIK ITU DOMESTIK MAUPUN MANCANEGERA DAPAT MERASA NYAMAN BERKUNJUNG KE KABUPATEN GARUT SEHINGGA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT;
  - b) PEMERINTAH KABUPATEN GARUT AGAR MEMBERIKAN PENYULUHAN, PELATIHAN DAN BIMBINGAN BAGI PARA PETANI MAUPUN PARA PELAKU AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, SUPAYA DAPAT MENINGKATKAN *VALUE ADDED* DARI PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN SEHINGGA DAPAT MENYOKONG UPAYA KABUPATEN GARUT SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA;
3. TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SERTA NILAI TAMBAH DAN KERAGAMAN KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, MAKA TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ANTARA LAIN:
- a) PEMERINTAH DAERAH HARUS BERUPAYA UNTUK DAPAT MENGURANGI TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN YANG BERPOTENSI MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEHINGGA DAPAT MENAKIBATKAN MENURUNNYA KUALITAS HASIL PRODUKSI MAUPUN TINGKAT PRODUKTIFITASNYA;
  - b) PERLU DILAKUKANNYA UPAYA-UPAYA PEMANFAATAN POTENSI LAHAN SEPANJANG PESISIR PANTAI YANG SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL. SELAIN ITU, MASIH TERJADINYA ALIH FUNGSI PENGGUNAAN LAHAN SEMPADAN PANTAI YANG TANPA MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN DAN KEAMANAN. UNTUK ITU, KAMI MENYAMPAIKAN CATATAN AGAR PEMERINTAH DAERAH HARUS SECARA KONSISTEN MELAKUKAN PENGENDALIAN SERTA OPTIMALISASI

PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN PANTAI SESUAI DENGAN TATA GUNA LAHANNYA.

4. BERKENAAN DENGAN PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM, SEBAGAI SALAH SATU SOKO GURU PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH HARUS TERUS DAPAT MENINGKATKAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, SELAIN ITU PEMERINTAH DAERAH SEHARUSNYA MEMBUAT LANGKAH STRATEGIS UNTUK MELINDUNGI DAN MENJAGA KELANGSUNGAN PRODUK UMKM AGAR BISA BERSAING DENGAN PRODUK PERUSAHAAN MODERN. DIHARAPKAN PEMERINTAH MEMBUAT TEROBOSAN KEMUDAHAN PERSYARATAN DALAM PEMBERIAN KREDIT LUNAK KE UMKM DAN MASYARAKAT AGAR TIDAK TERJEBAK KEPADA PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG MEMBERATKAN UMKM SECARA FINANSIAL.
5. PEMERINTAH DAERAH HARUS TERUS MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI MELALUI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN, PENGENDALIAN PENGGUNAAN PUPUK KIMIA SECARA TERUS MENERUS YANG TENTU SAJA DALAM JANGKA WAKTU YANG PANJANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESUBURAN TANAH. DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN DAN SWASEMBADA PANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIPROGRAMKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

**6. MISI III : MEWUJUDKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI SERTA LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN DAN NYAMAN;**

BERKENAAN DENGAN UPAYA-UPAYA PENCAPAIAN PADA MISI KETIGA, KAMI MEMANDANG TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI MASA MENDATANG, YAITU ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. DALAM LAPORAN LKPJ DISAMPAIKAN BAHWA KEMANTAPAN JALAN SUDAH DI ATAS 80% DALAM KENYATAANNYA KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN MASIH DI BAWAH 70 PERSEN, SEHINGGA MASIH SERING TERLIHAT KUBANGAN AIR DI JALAN KABUPATEN, IRONIS SEKALI KALAU DIBANDING DENGAN JALAN DESA YANG BERHOTMIX MULUS KARENA DIDANAI DANA DESA. PEMERINTAH

DAERAH HARUS MEMPERHATIKAN JALAN KABUPATEN YANG TELAH ADA AGAR TERPELIHARA DAN MULUS SEPERTI LAYAKNYA JALAN PROVINSI YANG SETIAP SAAT DIPELIHARA KEMANTAPANNYA.

2. KURANGI PEMBUKAAN JALAN BARU BILA JALAN YANG LAMA BELUM DIPELIHARA DENGAN BAIK DENGAN ALASAN KETERBATASAN ANGGARAN. SEHINGGA HARUS DIBUAT PERENCANAAN YANG KONPREHENSIF. TERUTAMA MENGANTISIPASI ALIRAN AIR YANG MENYEBABKAN BANJIR MELUAP KE JALAN, SELAIN MENGGANGGU PENGGUNA JALAN JUGA MEMBUAT BADAN JALAN CEPAT RUSAK DAN BERDAMPAK KE PENGHAMBURAN BIAYA JUGA PEMBOROSAN ANGGARAN.
3. BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN IRIGASI BENDUNGAN COPONG ATAU IRIGASI LEUWIGOONG MASIH BELUM BISA DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL KARENA PEMBANGUNAN SALURAN TERSIER TERHENTI, PADAHAL DALAM RENCANA AWAL BISA MENGAIRI SEKITAR 4.500 HA, BEGITU JUGA DENGAN IRIGASI TEKNIS LAINNYA DI WILAYAH SELATAN DAN TENGAH.
4. PEMUKIMAN KUMUH HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS, MASIH BANYAK KITA JUMPAI UNTUK MENCAPAI HIDUP BERSIH DAN SEHAT AKAN SULIT TERCAPAI DITAMBAH LAGI DENGAN CAKUPAN AIR BERSIH DI BEBERAPA TEMPAT YANG MASIH SULIT DIDAPAT BAIK MELALUI PENANGANAN OLEH PDAM MAUPUN PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT DI TINGKAT DESA ATAS PEMANFAATAN MATA AIR DAN SUMUR ARTETIS. SEHINGGA PERLU AKSES UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA DAN KALABORASI DENGAN LEMBAGA YANG PROFESIONAL UNTUK MEMBANTU MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI.
5. KETIDAKBERANIAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH YANG MASIH SANGAT BANYAK. SEHINGGA KEMISKINAN BERTAHAN DI ANGKA RATUSAN RIBU DAN KABUPATEN GARUT URUTAN KEDUA SEBAGAI KABUPATEN TERMISKIN DI JAWA BARAT.

6. PADA SEKTOR PEKERJAAN UMUM KEBINAMARGAAN, KHUSUSNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN, KAMI MEMANDANG KEGAGALAN. TERBUKTI DALAM LAPORAN CAPAIAN KINERJA HANYA MENINGKAT 0,1%. MAKA DENGAN ITU AGAR PEMERINTAH DAERAH MENYIKAPI TERKAIT KINERJA KEBINAMARGAAN. ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN YAITU :
- a) TERKAIT DENGAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONTRUKSI DI LAPANGAN, ADA BANYAK TEMUAN HASIL AUDIT BAIK ITU YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT MAUPUN BPK DARI TAHUN KE TAHUN KARENA LEMAHNYA PENGAWASAN LAPANGAN. HARAPANNYA AGAR SAUDARA BUPATI DAPAT MEMBERIKAN INSTRUKSI KEPADA DINAS TERKAIT UNTUK DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN SELURUH PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN BAIK SERTA MEMENUHI KAIDAH-KAIDAH YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  - b) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN MAUPUN JEMBATAN HARUS DILAKUKAN MELALUI PERENCANAAN YANG BAIK DAN KOMPREHENSIF, BAIK DARI ASPEK TEKNIS, BIAYA MAUPUN JANGKA WAKTU Pengerjaannya, sehingga tidak ada pekerjaan yang terkesan dilaksanakan secara asal-asalan dan dipaksakan;
7. TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBUAT PERENCANAAN YANG BAIK, KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI, DAN APABILA DIPANDANG PERLU MAKA HARUS DISUSUN DALAM SUATU MASTERPLAN SEHINGGA TAHAPAN DEMI TAHAPANNYA MENJADI JELAS DAN TERJADWAL DENGAN BAIK. SEHINGGA TARGET PENCAPAIAN TINGKAT KEMANTAPAN JARINGAN IRIGASI MAUPUN KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DAPAT TEREALISASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI, KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MAUPUN DALAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

8. PEMERINTAH DAERAH HARUS BETUL-BETUL MEMPERHATIKAN URAIAN KEDALAMAN KEGIATAN YANG HARUS SESUAI DENGAN NOMENKALTUR JUDUL KEGIATANNYA, SEHINGGA TIDAK TERKESAN MEMAKSAKAN SEBUAH PROGRAM SEBAGAI URUSAN YANG MENJADI KEGIATAN, HAL INI BERKAITAN DENGAN BANYAKNYA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BAIK DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAUPUN APARATUR PENEGAK HUKUM, YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PADA SUB SEKTOR PEKERJAAN UMUM;
9. PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF DENGAN MELAKUKAN KAJIAN YANG MENYELURUH TERKAIT DENGAN SISTEM TRANSPORTASI DAN LALULINTAS, SEHINGGA BISA MEMINIMALISIR TINGKAT KEMACETAN, DAN INI HARUS DIKUTI DENGAN PENERTIBAN LAHAN PARKIR PADA BAHU JALAN AGAR TIDAK SEMAKIN MEMPERSEMPIT RUANG JALAN YANG DAPAT DIGUNAKAN;
10. BERKENAAN DENGAN KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT PENANGANAN SAMPAH SERTA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, PEMERINTAH DAERAH HARUS SEGERA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BAIK MELALUI MANAJEMEN PENANGANAN SAMPAH YANG TERINTEGRASI SELAIN ITU PEMERINTAH HARUS MENAMBAH CAKUPAN DAERAH PELAYANAN SAMPAH AGAR TIDAK TERKONSENTRASI DI GARUT BAGIAN TENGAH DAN UTARA SAJA.
11. PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENANGANAN PJU SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN. SELAIN ITU PEMERINTAH DAERAH JUGA HARUS MEMILIKI DATA BASE YANG AKURAT DAN LENGKAP DENGAN DATA KONDISI YANG SEBENARNYA, SEHINGGA LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN DAPAT DILAKUKAN SECARA TERJADWAL DAN TEPAT SASARAN UNTUK MENGURANGI BANYAKNYA KELUHAN MASYARAKAT MENGENAI MASIH BANYAK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) YANG TIDAK BERFUNGSI.

12. UNTUK MEWUJUDKAN GARUT CAANG MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK KEBUTUHAN PJU SAMPAI KE TINGKAT DESA YANG MANA SETIAP SAAT BANYAK DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT.
13. PEMERINTAH DAERAH HARUS MENATA DAN MEMELIHARA SERTA MEMBANGUN HUTAN KOTA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PARU-PARU DI WILAYAH PERKOTAAN SESUAI DENGAN TARGET KEWAJIBANNYA.
14. PEMERINTAH DAERAH HARUS MENERAPKAN ASPEK KEHATI-HATIAN DALAM PEMBELIAN ASSET TERUTAMA PENGADAAN TANAH AGAR DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN KARENA MASIH BANYAK ASSET PEMERINTAH YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH MILIK PIHAK KETIGA YANG BELUM DI SELESAIKAN.

**D. MISI IV : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, AMANAH SERTA MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK YANG DEMOKRATIS YANG BERBUDAYA LUHUR :**

TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PADA MISI KEEMPAT YANG BERORIENTASI PADA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK, MAKA ADA BEBERAPA CATATAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH DAERAH, YAITU :

1. PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN MASIH MENYISAKAN PERMASALAHAN YANG BERKEPANJANGAN MENINGGAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MERUPAKAN UNSUR YANG SANGAT PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH. SEHINGGA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT HARUS MENGEDEPANKAN KEMUDAHAN DALAM MENGAkses PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI SELURUH KANTOR KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN GARUT SEHINGGA DENGAN MENDEKATKAN PELAYANAN KE MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KECEPATAN DAN KEMUDAHAN DALAM PENGURUSAN ADMINDUK OLEH MASYARAKAT.

2. UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, MAKA PEMERINTAH HENDAKNYA MENGEDEPANKAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE*.
3. BAPPEDA HARUS MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, SEBAGAI LEADING SECTOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN HENDAKNYA LEBIH PROAKTIF MELAKUKAN KOORDINASI PERENCANAAN BERSAMA OPD-OPD LAINNYA DENGAN DIDUKUNG OLEH KEBIJAKAN KEPALA DAERAH YANG TEGAS, SEHINGGA KE DEPAN TIDAK AKAN TERULANG MIS KOMUNIKASI ANTARA BAPPEDA DAN DINAS TEKNIS SEHINGGA PROGRAM YANG SUDAH DIRENCANAKAN TIDAK BISA DIREALISASIKAN SEPERTI CONTOH PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT MALANGBONG YANG SUDAH MASUK TAHAP PERENCANAAN TETAPI TIDAK DAPAT DIBANGUN KARENA BELUM ADANYA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TERSEBUT.
4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) HARUS LEBIH FOKUS UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SELAIN ITU DIHARAPKAN SEMUA OPD UNTUK SECARA SUNGGUH-SUNGGUH MELAKUKAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA APARAT DAN PENEGAKAN ATURAN SECARA TEGAS TERHADAP APARAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN.
5. MASIH TERBATASNYA PROGRAM UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS ASN, SEHINGGA DIDAPATKAN ASN YANG KURANG PROFESIONAL. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS HARUS MEMBERIKAN AKOMODASI BAGI BEBERAPA PEGAWAI YANG PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN DIRINYA DAN PADA GILIRANYA AKAN MENGEMBANGKAN KINERJA OPD-NYA.
6. HARUS DI KEMBANGKAN PROGRAM PENATAAN BIROKRASI UNTUK MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN SEBAGAI AKIBAT DARI KURANG TERTIBNYA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN, KONDISI INI MENJADIKAN LAHIRNYA BIROKRASI YANG LEBIH PATUH KEPADA ATASAN DARI PADA PATUH KEPADA ATURAN.

7. TERKAIT PROSES LELANG PROYEK DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEMERINTAH DAERAH HARUS MAMPU DAN BERANI MENERAPKAN PROSEDUR SESUAI DENGAN ATURAN DAN KETENTUAN YANG ADA AGAR TIDAK TERJADI GAGAL LELANG.
8. BERKENAAN DENGAN UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN KONTROL PENGATURAN REPRODUKSI KELUARGA YANG SEHAT SERTA PELAKSANAAN FUNGSI KELUARGA, DENGAN TERUS MELAKUKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PILAR DARI KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.
9. MENDORONG PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNTUK MEMBANGUN PUSAT PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DAN TERPADU SEHINGGA MEMUDAHKAN MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH LAYANANNYA TERKAIT DENGAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN, SEHINGGA DAPAT MEMINIMALISIR TERJADINYA GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LIAR.

PERLU DIPAHAMI BAHWA REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM YANG BAIK DIDASARKAN PADA AKAR MASALAH YANG DIHADAPI SEHINGGA PROGRAM KEBIJAKAN BENAR-BENAR MENGARAH PADA PEMECAHAN MASALAH YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN RPJMD, SELAIN CATATAN DI ATAS PANSUS JUGA MENYAMPAIKAN REKOMENDASI KEPADA BUPATI SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT WAJIB DAN PERLU UNTUK MELAHIRKAN LANGKAH DAN IDE-IDE KREATIF GUNA MENINGKATKAN PAD. SEBAGAI POTENSI YANG SUDAH ADA SELAMA INI SERTA HASIL KREATIVITAS PEMASUKAN PAD MENJADI PENTING DAN *URGENT*.

2. LKPJ BUPATI GARUT TAHUN ANGGARAN 2019 INI BELUM MAMPU MENJELASKAN TENTANG AZAS KEMANFAATAN ATAU *OUTCOME*, DARI SETIAP PROGRAM TERHADAP MASYARAKAT ATAU PENGGUNA PROGRAM. KARENA UKURAN KINERJA LKPJ BUKAN HANYA DARI TERSERAPNYA ANGGARAN DARI SETIAP PROGRAM MASING-MASING OPD. SETIAP OPD HARUS MEMPUNYAI STANDAR PELAPORAN YANG SAMA TERHADAP PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN.
3. MASIH TERDAPAT OPD DENGAN POSTUR BELANJA OPERASIONAL YANG KURANG EFISIEN SEMENTARA DISISI LAIN MEMILIKI BEBAN LAYANAN DAN PROGRAM PUBLIK YANG TERGOLONG STRATEGIS. PEMERINTAH DIMINTA MENJADIKAN AGENDA PERAMPINGAN STRUKTUR BIAYA BIROKRASI SEBAGAI PRASAYARAT POKOK KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BERBUAT LEBIH BANYAK DAN LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT.
4. MENINGKATNYA SILPA PADA TAHUN 2019, MENJADI CATATAN SERIUS BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT, HAL INI MENUNJUKAN LEMAHNYA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN. UNTUK MENGURANGI SILPA, PEMERINTAH DAERAH HARUS DAPAT MEMASTIKAN KINERJA PROGRAM YANG TERENCANA, TERSUSUN DAN TERUKUR .
5. TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT AGAR MELAKUKAN PEMBENAHAN DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI KEBOCORAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAIKNYA DITETAPKAN DALAM SALAH SATU MISI PADA RPJMD 2019 – 2024.

**REKOMENDASI :**

CATATAN-CATATAN STRATEGIS KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI GARUT SEBAGAI BAHAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK SEKALIGUS UNTUK DITINDAKLANJUTI SESUAI MEKANISME DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DITETAPKAN DI : GARUT  
PADA TANGGAL

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**

**EUIS IDA WARTIAH**